

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penegasan Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
G. Metode Penelitian	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Omnibus Law	19
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22
C. Fiqih Siyasah	31
D. Penelitian Terdahulu	36

BAB III PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law	42
B. Undang-Undang Terkait Yang Diubah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	80
B. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020	103
C. Penerapan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Fiqh Siyasah	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	46
Tabel 3.2	Perubahan Substansi pada Klaster Perizinan Berusaha.....	47
Tabel 3.3	Daftar Pasal Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dihapus.....	50
Tabel 3.4	Perubahan Substansi Klaster Persyaratan Investasi.....	53
Tabel 3.5	Perubahan Substansi Klaster Ketenagakerjaan.....	54
Tabel 3.6	Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus.....	60
Tabel 3.7	Perubahan Substansi Klaster UMKM.....	62
Tabel 3.8	Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang UMKM yang dihapus.....	63
Tabel 3.9	Perubahan Substansi Klaster Kemudahan Berusaha.....	64
Tabel 3.10	Perubahan Substansi Klaster Dukungan Riset dan Inovasi.....	65
Tabel 3.11	Perubahan Substansi Klaster Administrasi Pemerintahan.....	66
Tabel 3.12	Perubahan Substansi Klaster Kedelapan.....	68
Tabel 3.13	Daftar Pasal dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dihapus.....	71
Tabel 3.14	Perubahan Substansi Klaster Pengadaan tanah.....	72
Tabel 3.15	Perubahan Substansi Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah	75
Tabel 3.16	Daftar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang dihapus.....	76
Tabel 3.17	Perubahan Substansi Klaster mengenai Kawasan Ekonomi Khusus	77
Tabel 3.18	Daftar Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang dihapus.....	80
Tabel 5.1	Daftar Partisipan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.....	98